

PEMBUATAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT YANG BERAGAMA ISLAM DIHADAPAN NOTARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM ISLAM

- RABITHAH KHAIRUL -

ABSTRACT

Its development adoption at this juncture not just separation of the juridical relationship with her biological parents, but by this time the problems of adopted children already developed to the problem of the Division of the inheritance. The existence of adopted children in succession at this point still being debated are always discussed, both in the circle of politicians, academics, and law enforcers. A will is a thing that can not be separated from the law. A will relating to the rights of power or responsibility that will run after someone dies, for example, a person she talked to other people in order to help educate his son later, paying debts or return an item ever dipinjamnya, on the other hand is also an obligation for people who can afford against children who have no parents, as a humanitarian mission and practice the teachings of the religion.

Keywords: Wills Wajibah, A Foster Child, Notary Public

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia yang berkualitas. Sangat diperlukan pembinaan sejak dini bagi anak yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Membentuk suatu keluarga kemudian melanjutkan keturunan merupakan hak dari setiap orang. Konsekuensi dari adanya suatu hak adalah timbulnya suatu kewajiban, yakni kewajiban antara suami isteri dan kewajiban antara orang tua dan anak. Bagi setiap keluarga, anak merupakan sebuah anugerah yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya, karena dengan hadirnya seorang anak akan melengkapi kebahagiaan sebuah keluarga.

Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan data menyebabkan perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang merupakan beberapa peristiwa

hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, dikarenakan tujuan perkawinan itu tidak tercapai.”¹ Pengangkatan anak pada hakikatnya harus dipandang sebagai upaya untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan atau *artificial (adoption naturam imitator)*, sehingga Rabel menyatakan “*no institution can be designed as adoption, unless it makes the child legitimate in relation to the adopting parent.*”²

Perkembangannya pengangkatan anak ini bukan hanya sekedar pemisahan hubungan yuridis dengan orang tua kandungnya, namun pada saat ini permasalahan anak angkat sudah berkembang kepada masalah pembagian harta warisan. Keberadaan anak angkat dalam pewarisan di Indonesia pada saat ini masih menjadi polemik yang selalu diperbincangkan, baik dalam kalangan politisi, para akademisi, dan para penegak hukum. Simpang siurnya masalah pembagian harta dan kedudukan anak angkat dalam hal mewarisi baik secara Islam maupun secara ketentuan hukum perdata di antisipasi oleh orang tua angkat dengan membuat surat wasiat wajibah dihadapan notaris untuk memberikan hartanya kepada anak angkatnya.

Perlu ditekankan bahwa dalam penelitian ini hal pokok yang akan di bahas adalah mengenai peranan notaris dalam membuat akta wasiat wajibah yang harus sesuai ketentuan undang-undang dan tidak boleh melakukan penyelundupan dan penyelewengan hukum dalam pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak angkat tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diberi judul **“Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Beragama Islam Di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam.”**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

¹ Soerjono Soekanto & Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 275

² Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III, Bagian Pertama, (Jakarta: Kinta 1969), hlm. 96

1. Bagaimana kaidah dasar pemberian harta warisan melalui wasiat wajibah bagi anak angkat yang beragama Islam?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris sebagai pembuat akta wasiat wajibah apabila terjadi sengketa mengenai bagian anak angkat yang beragama Islam?
3. Bagaimana akibat hukum jika pembagian harta warisan dengan wasiat wajibah kepada anak angkat yang beragama Islam melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Tulisan ini dibuat sebagai karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum yang mengatur tentang harta warisan anak angkat, maka sesuai permasalahan yang diatas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kaidah dasar pemberian harta warisan melalui wasiat wajibah bagi anak angkat yang beragama Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris sebagai pembuat akta wasiat wajibah apabila terjadi sengketa mengenai bagian anak angkat yang beragama Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum jika pembagian harta warisan dengan wasiat wajibah kepada anak angkat yang beragama Islam melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau doktriner. Penelitian hukum normatif atau doktriner yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³ Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13

fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung kemudian dianalisis dan dilakukan pengambilan kesimpulan.⁴

2. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵

3. Sumber Data

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku, seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah, beberapa sumber internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*) dan juga dengan melakukan wawancara langsung dengan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 35

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93

informan (*field reseacrh*). Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁶

5. Analisis Data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut.⁷ Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas dan kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan.⁸

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. PEMBERIAN HARTA WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT KETENTUAN HUKUM ISLAM

A. Kedu dukan Dan Status Anak Angkat Dalam Pandangan Hukum Islam

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suatu keluarga untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkungan keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Selain itu maksud dari pengangkatan anak disini adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian tetapi saat ini dengan adanya perkembangan motivasi dari

⁶ Edy Ikhsan, Mahmul Siregar, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), 2009, hlm. 24

⁷ Soejono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 225

⁸ Lexi J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2008), hlm. 48

pengangkatan anak kini telah berubah yakni demi kesejahteraan anak yang diangkat.

Pengangkatan anak dewasa ini sering dilakukan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat. Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai karena pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang tidak diberi keturunan. Pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya.⁹

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
3. Hubungan kehartabendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah.
4. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan atau alamat.
5. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
6. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama orang yang beragama islam, agar si anak tetap pada agama yang dianutnya.

Motivasi pengangkatan anak dalam Islam adalah lebih kepada memberikan perlakuan dan menyalurkan rasa kecintaan serta kasih sayang kepada anak, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhan, bukan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri dengan segala konsekuensi

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, (Bandung: Al-Maa'rif, 1972), hlm. 19

¹⁰ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 54

hukumnya. Islam mengarahkan kepada manusia agar selalu peduli kepada sesama, karena sikap peduli sesama merupakan suatu hal yang memang harus selalu diamalkan, terlebih lagi terhadap anak-anak terlantar dan anak yatim. Islam juga mengajarkan umatnya untuk selalu menyantuni dan memelihara anak-anak yang tidak mampu, miskin, terlantar, dimana perbuatan penyantunan dan pemeliharaan anak-anak tersebut tidak sampai pada pemutusan hubungan keluarga dan hak-hak orang tua kandungnya dan pemeliharaan tersebut harus didasarkan pada penyantunan semata.¹¹

Tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, dimana hal ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan, dan salah satu jalan keluar yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Selain itu juga bertujuan untuk menambah jumlah keluarga, dengan maksud agar si anak angkat mendapat pendidikan yang baik, atau untuk mempererat hubungan keluarga. Sisi lain juga merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua, sebagai misi kemanusiaan dan pengamalan ajaran agama.¹²

B.H

ak Mewarisi Bagi Anak Angkat Dalam Pandangan Hukum Islam

Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”¹³ Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup orang tua angkatnya, si anak telah berbuat baik menemani orang tua angkatnya, oleh karena itu Islam sama sekali tidak menutup

¹¹ Muderis Zaini, *Op. Cit.*, hlm. 50

¹² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 31

¹³ Roihan A Rasyid, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 82

kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Melihat ketentuan diatas, jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap saja berhubungan dengan orang tua kandungnya, tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka pemberiannya dilakukan dengan hibah atau wasiat wajibah yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya semasa hidupnya.¹⁴

C.Bagi an Harta Warisan Bagi Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut, namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan wasiat wajibah yang sebenarnya.

Menurut ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam KHI orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk

¹⁴ Ahmad Kamil & Fauzan, *Op. Cit.*, hlm. 102

orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

Menurut ketentuan ajaran syari'ah, keberadaan anak angkat itu tidak dapat dipungkiri, akan tetapi sebatas untuk memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada anak. Hal-hal yang tidak diperkenankan adalah memutuskan hubungan darah antara si anak kandung dengan orang tua kandung, sehingga segala akibat dari hak mewarisi gugur karena tidak adanya nasab. Namun demikian sebaiknya anak angkat diberikan wasiat, akan tetapi apabila tidak ada wasiat maka anak angkat tersebut akan mendapat wasiat wasibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁵ Dengan demikian bahwa anak angkat tetaplah anak dan tidak menyebabkan adanya sebab pernasaban yang merupakan salah satu adanya hak mewarisi.

D.Kaidah Dasar Pelaksanaan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam Ketentuan Hukum Islam

Beberapa pengertian wasiat apabila dicermati pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan substansial akan tetapi antara satu dengan lainnya saling melengkapi, karena apabila dikristalkan terdapat beberapa unsur. Pertama, wasiat itu merupakan bentuk perikatan yang berkaitan dengan harta benda atau manfaatnya. Kedua, wasiat itu perbuatan yang dilakukan atas inisiatif atau kehendak sendiri secara sukarela. Ketiga, adanya perpindahan hak kepemilikan dari orang yang berwasiat kepada yang menerima wasiat. Keempat, pelaksanaan perpindahan hak kepemilikan terjadi setelah matinya orang yang berwasiat.¹⁶ Subtansi wasiat di atas berarti juga mengandung pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah meninggal

¹⁵ Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, *Komentar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nusantara Press, 1991), hlm. 27

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 46

kelak, akan tetapi pelaksanaan wasiat itu harus tunduk kepada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.¹⁷

Dalam hukum perdata Islam hanya kabul rukun wasiat, karena jika disatukan antara ijab dan kabul itu terlalu mengada-ngada, sebab bagaimana mungkin ijab dan kabul dilaksanakan seandainya penerima wasiat tidak ada ditempat, misalnya dalam keadaan si pewasiat ditengah perjalanan, atau si pewasiat meninggal mendadak.¹⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 menyatakan bahwa syarat seseorang dapat berwasiat adalah:

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari si pewasiat.
- (3) Pemilik terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menjadi syarat dalam melaksanakan wasiat, dimana wasiat:

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
- (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Pasal 196 termasuk juga kedalam syarat wasiat yang berbunyi “dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk untuk menerima harta benda yang diwasiatkan.” Secara teori, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 47

¹⁸ Suhardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 46

memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹⁹

Penerapan kaidah wasiat yang diatur KHI dilakukan dengan dua alasan, yaitu alasan pertama adalah untuk mengisi kekosongan hukum.²⁰ Argumentasi ini dibangun atas dasar bahwa wasiat wajibah merupakan sistem pemberian wasiat yang diatur oleh negara dan memiliki dasar hukum melalui KHI, namun di saat yang sama KHI tidak mengatur secara rinci tentang wasiat wajibah itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka hakim menggunakan aturan wasiat secara umum sebagai dasar putusan pemberian wasiat wajibah.²¹ Alasan yang kedua terkait penerapan kaidah hukum wasiat pada wasiat wajibah adalah demi untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Pemberian wasiat wajibah khususnya kepada anak angkat maupun orang tua angkat dapat mewujudkan keadilan terutama bila ada hubungan emosional yang sangat kuat antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga akan menjadi sangat tidak adil bila anak angkat tidak mendapatkan bagian atas harta waris yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.²²

2. TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT

A. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat

Peranan notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga

¹⁹ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, (Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX, 1998), hlm. 23

²⁰ Nugraheni, Ilhami, & Harahap, *Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah*, (Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010), hlm. 316

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).²³ Mengingat bahwa notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat memberikan beban dan tanggungjawab bagi setiap notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi notaris. Wibawa dan kehormatan profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum harus dijaga, karena itu diperlukan aturan-aturan yang mengatur, membatasi dan menjadi pedoman bagi notaris dalam melaksanakan jabatan serta berperilaku.

B. Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, harus sedemikian rupa mengatur kewajiban notaris secara seksama dan mendalam. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban senantiasa melandasi diri pada standar etika yang tinggi, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun kode etik organisasi notaris. Pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak angkat merupakan bentuk akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau dinamakan akta *partij*” (*partij akten*). Dalam akta *partij* ini, dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut. Termasuk di dalam akta *partij* antara lain akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli, kuasa, dan lain sebagainya. Pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak angkat ini harus berdasarkan kepada keotentikan sebuah akta, yang mana harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang, mengenai keabsahan dan kelengkapan dalam pembuatan sebuah akta otentik.

C. Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Sengketa Antara Para Ahli Waris Terkait Bagian Anak Angkat Karena Tertuang Dalam Akta Wasiat Wajibah

²³ *Ibid.*, hlm. 37

Notaris selain bertanggung jawab dalam membuat akta wasiat wajibah juga bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan wasiat wajibah ini notaris harus melaksanakan apa yang di kehendaki pewaris atau pewasiat dan menjelaskan semua yang diwasiatkan pewaris kepada seluruh ahli waris, hal ini dimaksudkan agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris mengenai hal-hal pelaksanaan wasiat yang diwasiatkan pewaris bagi seluruh ahli warisnya.

Sebuah akta notaris yang dipersoalkan di depan sidang pengadilan dalam perkara perdata dengan akta yang dibuat oleh notaris, lebih tepat jika menghadirkan seorang notaris yang membuat akta tersebut sebagai saksi ahli. Kehadiran notaris yang membuat akta yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara bukan sebagai saksi biasa melainkan sebagai saksi ahli yang akan menerangkan tentang apa yang saksi ketahui menurut keahlian saksi, berkaitan dengan prosedur baku terbitnya sebuah akta notaris.²⁴

3. AKIBAT HUKUM ATAS PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT BERAGAMA ISLAM YANG MELEBIHI BAGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG

A. Akibat Hukum Bagi Anak Angkat Atas Harta Warisan Yang Didapatkan Melalui Wasiat Wajibah Melebihi Bagian Yang Ditetapkan Undang-Undang

Lebihnya bagian anak angkat seringkali menjadi persengketaan dimana anak angkat digugat oleh anak kandung dari pewaris dikarenakan isi dari suatu akta wasiat wajibah yang dibuat oleh notaris lebih banyak memuat bagian anak angkat, yang berujung pada persengketaan antara anak angkat dan anak kandung pewaris. Mengenai wasiat yang melebihi sepertiga harta tidak dilaksanakan melainkan setelah adanya izin dari ahli waris. Wahbah Zuhaili menjelaskan pertama, imam madzhab empat berpendapat bahwa pemberian izin tidaklah diterima atau diharuskan untuk dilakukan melainkan setelah meninggalnya *mushii*. Apabila pemberian izin atau penolakan terjadi semasa hidup *mushii* hal

²⁴ Pricilia Yuliana Kambey, *Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal, *Lex Et Societatis*, Volume I Nomor 2, April – Juni, 2013), hlm. 30

tersebut tidak dianggap atau tidak sah, oleh karena, status kepemilikan harta peninggalan hanya akan sah menjadi milik ahli waris ketika *mushii* sudah meninggal, maka, pemberian izin atau penolakan mereka baru menjadi sah setelah status kepemilikan benar-benar ada ditangan mereka.²⁵ Wasiat tidaklah sah pada selebihnya dari 1/3 harta dalam wasiat yang diucapkan pada waktu sakit parah, yaitu yang kebanyakan orang mati dari penyakit sejenis itu, jika ditolak ahli waris khas yang mempunyai hak *tasarruf mutlaq*, karena harta itu adalah hak ahli waris itu. Apabila ada sebagian ahli waris yang menyetujuinya, maka syah untuk jumlah sebesar bagian mereka dalam selebihnya 1/3 harta, dan apabila seluruh ahli waris menyetujuinya.²⁶

**B. Akib
at Hukum Bagi Notaris Dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah Yang
Melebihi Bagian Seharusnya Yang Ditetapkan Undang-Undang**

Apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau yang berkepentingan, maka untuk menyelesaikannya harus didasarkan pada kebatalan dan pembatalan akta notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada akta-akta yang dibuat oleh notaris akan dikoreksi oleh hakim pada saat akta notaris tersebut diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti. Seorang notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. Akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik pada dasarnya terjadinya suatu perkara dimana pejabat umum telah mencari-cari keuntungan serta menyalahgunakan kewenangan yang telah diatur dalam UUJN dan UU perubahan atas UUJN dan seorang klien atau penghadap lainnya merasa dirugikan atas terbuatnya suatu akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris, sehingga berakibat akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 229

²⁶ Ali, *Fathul Mu'in* (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hlm. 40

C. Upaya Hukum Bagi Para Ahli Waris Terkait Harta Warisan Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah Yang Melebihi Bagian Seharusnya

Upaya hukum dalam acara perdata pada umumnya terdapat upaya hukum biasa berupa perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa *derden verzet* dan peninjauan kembali. Kasasi diharapkan dapat menjadi jawaban yang memuaskan para pihak, karena kasasi terbatas pada pemeriksaan terhadap penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu kejadian, sehingga dapat dilihat apakah dalam putusan sebelumnya telah melanggar hukum atau tidak dengan harapan dapat memberikan putusan yang memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Adapun apabila suatu putusan pengadilan negeri yang menurut mahkamah agung salah menerapkan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan maka putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi tersebut dapat dibatalkan oleh mahkamah agung.²⁷ Upaya hukum yang dilakukan ahli waris tetap, terhadap bagian anak angkat yang berasal dari wasiat wajibah masih mendapat perlindungan hukum dari hakim selaku pemegang kekuasaan kehakiman. Hakim berpendapat ahli waris adalah pihak yang paling berhak untuk mewarisi budel harta peninggalan pewaris, namun disisi lain kelebihan atas bagian anak angkat yang sudar diatur undang-undang, maksimal sepertiga ini sangat dimungkinkan untuk disimpangi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kaidah dasar yang digunakan oleh para hakim dalam menentukan pemberian wasiat wajibah adalah menggunakan kaidah wasiat umum sebagaimana yang ditentukan dalam KHI. Penerapan kaidah wasiat yang diatur KHI dilakukan dengan 2 (dua) alasan. Pertama adalah untuk mengisi kekosongan hukum, dan alasan yang kedua terkait penerapan kaidah hukum wasiat pada wasiat

²⁷ K.Wantjik Saleh, *Kehakiman Dan Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), hlm. 143

wajibah adalah demi untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Pemberian wasiat wajibah khususnya kepada anak angkat maupun orang tua angkat dapat mewujudkan keadilan terutama bila ada hubungan emosional yang sangat kuat antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga akan menjadi sangat tidak adil bila anak angkat tidak mendapatkan bagian atas harta waris yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Pada dasarnya, bila melihat pada ketentuan mengenai wasiat di dalam KHI, besar bagian yang diperbolehkan untuk diberikan melalui wasiat adalah paling banyak sepertiga dari harta warisan, dengan pengecualian dapat diberikan lebih melalui persetujuan para ahli waris lainnya.

2. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat wajibah atas bagian anak angkat yang beragama Islam tetap mengikuti ketentuan dalam Pasal 16 UUJN Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 UUJN ini memuat ketentuan tentang syarat-syarat bagi notaris dalam membentuk suatu akta, jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain dikenai sanksi tersebut pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan jika terbukti notaris melakukan pelanggaran terhadap UUJN seperti memalsukan identitas para pihak, memalsukan tandatangan, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
3. Lebihnya bagian anak angkat seringkali menjadi persengketaan dimana anak angkat digugat oleh anak kandung dari pewaris dikarenakan isi dari suatu akta wasiat wajibah yang dibuat oleh notaris lebih banyak memuat bagian anak angkat, yang berujung pada persengketaan antara anak angkat dan anak kandung pewaris. Akibat hukum terhadap akta wasiat wajibah yang dibuat oleh notaris secara melawan hukum atau terdapat persekongkolan maka akan menyebabkan akta otentik menjadi akta dibawah tangan serta akta tersebut

dapat dibatalkan oleh pengadilan. Terjadinya suatu akibat hukum yaitu berupa akta otentik menjadi akta dibawah tangan dan akta tersebut dibatalkan diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh notaris, dimana notaris dalam menjalankan wewenangnya telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan mengakibatkan berubahnya kekuatan pembuktian akta dan adanya pembatalan akta otentik tersebut oleh pengadilan. Anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat maka dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah, dan pemberi wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris. Kalau anak angkat mendapatkan bagian wasiat wajibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ bagian, maka wasiat wajibah tidak batal demi hukum melainkan harus dibatalkan dengan putusan pengadilan.

B. Saran

1. Sebaiknya hakim dan para pelaksana aturan hukum dalam menerapkan kaidah dasar pemberian harta warisan pewaris kepada anak angkat harus memperhatikan keberadaan dan kepentingan anak angkat bagi pewaris, walaupun pada dasarnya keutamaan kepentingan ahli waris lebih diutamakan, namun tidak seharusnya hak anak angkat diabaikan.
2. Sebaiknya notaris dalam melaksanakan setiap pembuatan akta wasiat wajibah lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan satu pihak, sehingga keberadaan masing-masing pihak tidak terabaikan dan mendapatkan kedudukan yang seimbang, namun jika dalam wasiat wajibah para ahli waris menyetujui lebihnya bagian anak angkat, maka notaris harus mencatat itu dalam aktanya, dan jika tidak disetujui pihak ahli waris maka notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Sebaiknya dalam hal kelebihan bagian anak angkat, hakim selaku pemutus akhir perkara gugatan harus memperhatikan semua aspek kepentingan anak angkat bagi pewaris selama hidupnya, agar hak-hak anak angkat menjadi terlindungi.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdur Rahman, Al-Zairy, *Fiqh Ala Madzahibi Al-Arba'ah, Jilid III*, Libanon Bairut: Daral-Kitab Al-Alamiyyah, 1990.
- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administritif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Ali, *Fathul Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Ahmad, Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Andasmita, Komar, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung: Sumur, 1981.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, Bandung: Al-Maa'rif, 1972.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Fuady, Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III, Bagian Pertama, Jakarta: Kinta 1969.
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Seri Disertasi*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Hamzah, Amir & Budiono, A. Rachmad, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Malang: IKIP, 1994.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- _____, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Haroen, Nasroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996.
- Hasan, Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2006.
- Ikhsan, Edy & Siregar, Mahmul, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Junaidi, Ahmad, *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

- Kamil, Ahmad, & Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Kie, Tan Thong, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru, 2001.
- , *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Koesoemawati, Ira & Rijan, Yunirman, *Kenotariatan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Lubis, Suhardi K. & Simanjuntak, Komis *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moelong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, 2008.
- Munawir, AW, *Kamus Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 2002.
- Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1982.
- Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Akan Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Prinst, Darwan, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Rachmad, Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000.
- Rasyid, Roihan A. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ridha, Rasyid, *Tafsir Al-Manar, Juz II*, Beirut: Dar Al-Ma'arif, 2000.
- Rustandi, Ahmad & Effendi, Muchjidin, *Komentar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nusantara Press, 1991.
- Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Saleh, K. Wantjik, *Kehakiman Dan Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
- Satrio, J. *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992.
- Soekanto, Soerjono & Taneko, Soleman B. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Padya Paramita, 2007.
- Suryabrata, Samadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sutantio, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syarif, Suriani Ahlan, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Tafal, B. Bastian, *Penangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Tono, Sidik *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012.
- Usman, Suparman & Somawinata, Yusuf, *Fiqh Mawarits Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid.X, Penerjemah Abdul Hayyie Al- Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

B. Artikel, Jurnal, Majalah, Seminar, Tesis

- A.A. NGR. Maha Putra, *Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Tesis, Bali: Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2014.
- Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX, 1998.
- Andi Ahmad Suhar Mansyur, *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris*, Jurnal, Malang: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.
- Arpani, *Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*, Artikel Hakim, Bontang: Pengadilan Agama Bontang.

- Dian Pramesti Stia, *Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta*, Tesis Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Didi Santoso, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)*, Tesis, Semarang: Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2009.
- Hartini & Yulkarnain Harahab, *Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pada Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Mimbar Hukum Nomor 35, V, 2000.
- Hartini, *Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Mimbar Hukum Nomor 37 Tahun II, 2001.
- Irwan Rosman, *Telaah Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.51K/AG/1999, Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.368.K/AG/1995*, Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2002.
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Thesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72, 1991.
- M. Idris Ramulyo, *Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'i Dan Wasiat Wajib Di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam*, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Thn. XII Maret 1982, Jakarta: FH UI, 1982.
- Nugraheni, Ilhami, & Harahab, *Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010.
- Pricilia Yuliana Kambey, *Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal, *Lex Et Societatis*, Volume I Nomor 2, April – Juni, 2013.
- Rosmawati, *Hak Mewaris Anak Angkat Menurut BW*, Majalah Al-Risalah: Volume 12 Nomor 2 Nopember 2012.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Thesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2004.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Internet

Pengertian Anak Pungut,

- <http://churryelmoena.blogspot.com/2013/02/makalah-masail-fiqhiyah-anak-zina-anak.html> (terakhir diakses tanggal 20 Juni 2013)
- Sigit Budhiarto, *Perkembangan Politik Hukum Waris Di Indonesia*
http://sigitbudhiarto.blogspot.com/2013/05/perkembangan-politik-hukumdiIndonesia_1089.html, (diakses terakhir tanggal 12 februari 2015)
- Teori Perlindungan Hukum,
<http://anamencoba.blogspot.com/2011/04/teori-perlindungan-hukum-dalam-melihat.html>, (terakhir diakses tanggal 14 Mei 2014)
- Yance Arizona, Kepastian Hukum,
<http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>,
(diakses tanggal 21 Februari 2014)